

Pengembangan Kapasitas di tingkat desa

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 1-7-001

Kontribusi dari **SOfEI**

<p>Judul Proyek:</p> <p>Pemetaan Kapasitas dan Membangun Kesadaran mengenai Penduduk Asli (<i>Indigeneous People's Capacity Mapping and Awareness Initiative</i>)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Jalan Jeruk Nipis No.117 Kotaraja-Jayapura P.O. Box 1114, Jayapura Telp: (0967) 581071; Fax: (0967) 581778 E-mail: ypmd@jayapura.wasantara.net.id</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggand dana):</p> <p>Rp. 1,184,649,375 Sumber Dana: DSF-Trust Fund Pemerintah Belanda</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Program ini merupakan program kerja sama langsung dengan masyarakat dan difasilitasi oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) seperti yang dijelaskan di atas.</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Objectives:</p> <p>Mengingat program ini dirancang berdasarkan pengalaman dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, iniatif ini mengarah pada menguatnya inisiatif, partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan melalui kemitraan. Dengan demikian maka beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui program ini antara lain:</p> <p>Tujuan 1 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan marga dalam menyusun profil masyarakat adat yang meliputi berbagai aspek dalam bentuk dokumen tertulis serta mampu mengelolah berbagai data tersebut untuk kepentingan pembangunan masyarakat adat</p> <p>Tujuan 2 Menguatnya peran dan fungsi marga dalam melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan di kampung terutama dalam ikut merencanakan dan mengambil keputusan-keputusan terkait pembangunan masyarakat</p> <p>Tujuan 3 Menguatnya proses desentralisasi dari pemerintah tingkat distrik ke tingkat kampung/desa melalui pelimpahan kewenangan dan keuangan dalam rangka mempercepat proses pembangunan kampung tanpa menghilangkanan daya, inisiatif dan berbagai sistim sosial budaya sebagai jati diri masyarakat adat</p>	

Outputs:

Dari beberapa langkah dan kegiatan yang akan dilakukan maka out-put yang dapat dijadikan pembuktian dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Adanya daftar nama marga sebagai peserta program
2. Adanya daftar nama LSM yang akan terlibat dalam kegiatan assesmen dan implementasi lanjutan
3. Adanya materi sosialisasi dan dokumen informasi makro serta kesepakatan jadwal kegiatan lapangan
4. Adanya kriteria dan perangkat pemetaan kapasitas dan inisiatif dari penduduk asli
5. Adanya laporan hasil analisis kapasitas dan inisiatif keperdulian penduduk asli.
6. Adanya rekomendasi model partisipasi masyarakat adat (marga) dalam pembangunan.

Outcomes:

1. Studi referensi memberi gambaran umum mengenai masyarakat adat yang menjadi sasaran fokus kajian. Dengan adanya studi tersebut memberikan kontribusi tentang keberadaan masyarakat asli di Papua dan Papua Barat yang dapat dikembangkan atau ditindak lanjuti melalui pengumpulan informasi secara keseluruhan.
2. Peta struktur adat dapat memberikan pemahaman atau penjelasan tentang struktur masyarakat adat serta definisi yang tepat tentang pengistillahan atau penyebutan tentang suku, klan, marga, fam, sebagai satuan komunikasi adat. Peta ini menggambarkan posisi satuan adat terkecil yang memiliki kewenangan atau otoritas atas sumber daya alam dan hak ulayat.
3. LSM yang terlibat dalam pemetaan kapasitas klan, selain dia sendiri memahami mengenai keberadaan klan dalam struktur adat, juga dapat membantu masyarakat mempromosikan kapasitas dan potensi yang dimiliki. Profil LSM menjadi referensi kepada mitra lain untuk melakukan kajian serupa.
4. Kriteria dan perangkat pemetaan dan promosi kapasitas klan dikembangkan dalam konteks masyarakat adat Papua dan Papua Barat. Alat tersebut menggambarkan teknik untuk melakukan penilaian terhadap masyarakat oleh masyarakat tentang apa yang dimiliki dan yang diharapkan. Materi ini mendorong masyarakat untuk melakukan kajian terhadap dirinya sendiri dan menjadikannya sebagai kapasitas atau kekuasaan dalam pembangunan berbasis masyarakat.
5. Hasil analisis pemetaan dan promosi kapasitas clan dapat menjadi sumber informasi dalam pembuatan kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku dalam pembangunan. Pengembangan pola kemitraan antara masyarakat adat atau *clan* dan stakeholder lain dapat ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi dari hasil analisis.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)

- 1-1 Asupan makanan dan gizi
- 1-2 Kesehatan
- 1-3 Pendidikan
- 1-4 Ekonomi Lokal
- 1-5 Kesetaraan Gender
- 1-6 Infrastruktur Dasar
- 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa
- 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4-0 Lain-lain

Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)

- Provinsi:
- Kabupaten:
- Kota:
- Distrik(Kecamatan):
- Kampung/Desa:

Provinsi	Papua	Papua Barat
Kabupaten	1. Jayapura 2. Keerom 3. Sarmi 4. Tolikara 5. Jayawijaya	1. Kaimana 2. Fak-Fak 3. Teluk Bintuni 4. Sorong

Pembangunan Kapasitas Masyarakat Asli/Adat, Organisasi Masyarakat Sipil		6. Yahukimo 7. Pegunungan Bintang 8. Merauke 9. Asmat 10. Mappi 11. Boven Digoel 12. Paniai 13. Timika 14. Puncak Jaya 15. Waropen 16. Yapen Waropen 17. Nabire 18. Biak Numfor 19. Supiori	5. Manokwari 6. Raja Ampat 7. Sorong Selatan 8. Tuluk Wondama
	Kota	Jayapura	Sorong
	Distrik (Kecamatan)	47	26
	Kampung / Desa		

Pola Pelaksanaan:

Pelaksanaan program akan dilakukan oleh YPMD berdasarkan catatan konsep dan proposal yang telah disetujui. Jadwal dan penjelasan komponen program secara lebih terinci tersedia oleh YPMD jika diminta.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Dari berbagai proses dan pendekatan pembangunan yang terjadi selama ini, mengakibatkan rendahnya partisipasi dan inisiatif masyarakat, dan pada sisi lain tertutup akses dalam pengambilan keputusan untuk masa yang diinginkan masyarakat. Perilaku yang kemudian muncul adalah sikap instan pada sebagian masyarakat yang ingin segala sesuatu dengan mudah walaupun harus mengorbankan sumberdayanya seperti menjual tanah, dan sebagian lainnya hanya menunggu bantuan pemerintah yang setiap tahun mengerahkan sejumlah santa claus melalui instansi teknis yang telah menyiapkan proyek-proyek bantuan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah yang di atas inisiatif ini bermaksud untuk berbagai keahlian dan ketrampilan yang terkait dengan aspek kelembagaan terutama dalam mendeskripsikan ulang tentang dirinya sendiri melalui profil masyarakat yang lebih akurat sebagai data dasar yang mampu di perbaharui setiap tahun. Dengan demikian diperlukan suatu pendekatan baru melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang lebih menitikberatkan peran dan inisiatif masyarakat terutama dalam merencanakan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya lainnya yang dimiliki dan dikuasai masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam kerangka kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pihak secara lebih bermartabat.

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 1-7-002

Kontribusi dari UNDP-Cap2015

<p>Judul Proyek:</p> <p>Capacity 2015 – Kemitraan bagi Pembangunan Berkesinambungan di Papua Barat (<i>Partnerships for Sustainable Development in Papua & Papua Barat</i>).</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>UNDP/Capacity 2015 in Papua and Papua Barat Lantai 15, Gedung Surya Jalan M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350 Tel: 3902402/04; Fax: 3902524 Email: cap2015-papua@indo.net.id</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):</p> <p>US\$ 1,180,000 (Juli 2004 – Juni 2007), Beyond Petroleum (BP) dan UNDP.</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>MenKo Ekon, BAPPEDA Papua Barat, BAPPEDA Papua dan UNDP Beserta mitra pelaksana lainnya: Pemerintah Daerah (Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat), BP, LSM setempat & internasional, Akademisi, dan IFC/PENSA.</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Proyek Capacity 2015 – Partnerships for Sustainable Development in Papua dan Papua Barat (atau disebut Cap.2015) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan lokal melalui kegiatan penguatan kapasitas. Kegiatan proyek sejalan dengan pencapaian tujuan MDG pertama (pengurangan kemiskinan), ketujuh (pelestarian lingkungan), dan kedelapan (peningkatan kemitraan global). Sejak proyek diluncurkan pada tahun 2004, memasuki tahap implementasi pada bulan Juli 2006, kegiatan proyek memberikan perhatian pada perencanaan tata ruang di Provinsi Papua Barat melalui perencanaan pembangunan berbasis ekosistem.</p> <p>Tujuan kegiatan proyek terutama memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati melalui perencanaan tata ruang yang baik dalam mengelola dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari kegiatan pembangunan berskala besar di Papua Barat seperti BP (Beyond Petroleum) Tangguh dengan gas alam cairnya. Proyek diharapkan dapat menghasilkan suatu perencanaan tata ruang yang baik bagi Papua Barat dalam usahanya untuk meningkatkan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat untuk mempersiapkan kapasitas para pemangku kepentingan di Papua Barat dalam merencanakan kegiatan pembangunan sebelum tahun 2015, ketika diterapkan bagi hasil dari keuntungan BP Tangguh antara Pemda Papua Barat dan Pemerintah Pusat.</p>	

Selama dua tahun hingga bulan Juni 2006, proyek telah melaksanakan kegiatan utama, yakni: 1) meningkatkan kemitraan di antara pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil; 2) merencanakan strategi pembangunan jangka panjang serta tata ruang wilayah di Papua Barat; 3) melakukan usaha kearah perbaikan peraturan serta proses pengaturan dalam mengelola peluang-peluang yang berkaitan dengan keberadaan BP Tangguh serta investasi luar negeri berskala besar lainnya di Papua Barat; dan 4) meningkatkan kapasitas bagi pembangunan untuk mendukung pelaksanaan sistem penggunaan tata ruang bagi pencapaian hasil pembangunan yang berkaitan dengan MDG.

Tim Proyek saat ini telah merampungkan dokumen perencanaan pembangunan wilayah (*Regional Development Plan/RDP*) untuk Papua Barat, menyelesaikan konsep pengelolaan kawasan bersama (*Joint Management Area*) di Teluk Bintuni, serta menajamkan konsep Strategi Penyebaran dan Pemerataan Pertumbuhan (SP3 atau *Diversified Growth Strategy/DGS*) yang mendukung kegiatan RDP dan JMA.

Sejak bulan Juli 2006, Tim Proyek telah membuka sekretariat di Manokwari, Papua Barat, menandai dimulainya tahap implementasi, dan langsung bekerja-sama secara erat dengan Pemda Papua Barat (dalam hal ini para Kepala Bidang dan Ketua BAPPEDA). Hingga akhir bulan Desember 2006, Tim Proyek telah berhasil tidak saja mensosialisasikan dokumen/konsep proyek, tetapi Pemda Papua Barat bahkan telah menerima, mengadopsi serta mengintegrasikan masukan dari arahan dokumen/konsep proyek kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD: 2006-2011). SK Gubernur Papua Barat untuk pelaksanaan kegiatan RPJMD beserta Tim Kelompok Kerjanya telah disahkan oleh Gubernur Papua Barat (*Peraturan Gubernur Papua Barat No. 9 Tahun 2006 tertanggal 9 Oktober 2006*). Selanjutnya Tim Proyek saat ini tengah membantu Pemda Papua Barat untuk menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP (2006-2026), selain menjabarkan RPJMD dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tim Proyek juga tengah menyiapkan inisiatif kegiatan proyek untuk Pemda Papua Barat berdasarkan arahan yang telah tertuang dalam RPJMD, dan kemudian dijadikan sebagai acuan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mulai tahun 2007.

Rekomendasi Tim Proyek tentang Strategi Penyebaran Pusat Pertumbuhan (SP3/DGS) kemudian diadopsi oleh Provinsi Papua Barat kedalam Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi, yang kini tengah diselesaikan perinciannya oleh UNIPA di Manokwari dengan dana dari Pemda Papua Barat sebesar Rp. 1,8 Milyar. Produk ini nantinya ditetapkan sebagai acuan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan hasil dari Pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 8 Desember 2006 di Jakarta, untuk dapat menyelesaikan MOU (Nota Kesepahaman) proyek dengan Provinsi Papua, kegiatan proyek diharapkan selesai di bulan Maret 2007. Kemudian, MOU baru dengan Pemda Papua Barat dapat segera ditindak-lanjuti, dengan merujuk pada inisiatif proyek baru yang telah disiapkan untuk dilanjutkan oleh Pemda Papua Barat, donor (BP atau/dan donor lainnya) serta/atau UNDP/People-centred Development Programme.

<p>Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)</p> <p><input type="checkbox"/> 1-1 Asupan makanan dan gizi</p> <p><input type="checkbox"/> 1-2 Kesehatan</p> <p><input type="checkbox"/> 1-3 Pendidikan</p> <p><input type="checkbox"/> 1-4 Ekonomi Lokal</p> <p><input type="checkbox"/> 1-5 Kesetaraan Gender</p> <p><input type="checkbox"/> 1-6 Infrastruktur Dasar</p>	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Provinsi:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kabupaten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kota:</p> <p><input type="checkbox"/> Distrik(Kecamatan):</p> <p><input type="checkbox"/> Kampung/Desa:</p>
--	---

<input checked="" type="checkbox"/> 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa <input checked="" type="checkbox"/> 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan <input checked="" type="checkbox"/> 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia <input type="checkbox"/> 4-0 Lain-lain Program berfokus pada perencanaan pembangunan wilayah dalam mengelola sumber daya alam, khususnya dalam perencanaan tata ruang, pembangunan kapasitas, serta penguatan kemitraan.	Provinsi	Papua	Papua Barat
	Kabupaten	-	Manokwari, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak, Sorong Selatan, Sorong, Kaimana, Raja Ampat
	Kota		Sorong
	Distrik (Kecamatan)		-
	Kampung / Desa		-
	8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat.		
Pola Pelaksanaan:			
<p>Tim Proyek bekerjasama erat dengan BAPPEDA Provinsi Papua Barat: Ketua dan para Kepala Bidang dalam merencanakan program pembangunan di Papua Barat, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait terutama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi, para Ketua/Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, serta para pelaku pembangunan lainnya di Papua Barat (seperti UNIPA, LSM lokal, LSM internasional, pihak swasta, dan sebagainya).</p>			
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:			
<p>Dokumen tata ruang yang ada saat ini kurang melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan setempat (pihak yang berwenang, lembaga masyarakat sipil, kelompok adat/suku, dan lain sebagainya). Karenanya dokumen arahan RDP diharapkan dapat menjawab kebutuhan atas pemuatan lebih banyak nilai-nilai masyarakat setempat dalam membangun rasa kepemilikan serta meningkatkan penerimaan masyarakat atas perencanaan tersebut.</p> <p>Setelah mengalami beberapa kali penundaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan proyek karena terbentur status ketidakpastian dari Provinsi Papua Barat – walau telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi di bulan November 2004, akhirnya dengan pelantikan Gubernur Papua Barat yang baru pada tanggal 24 Juli 2006, Provinsi Papua Barat resmi menjalankan roda pemerintahannya sendiri – lepas dari Provinsi Papua. Kegiatan proyek selama ini yang disesuaikan dengan kondisi politik setempat, yakni lebih bergerak di tingkat kabupaten – mulai bulan Juli 2006, telah langsung berinteraksi di tingkat Provinsi, dengan memberikan bantuan teknis pada para Kepala Bidang dan Kepala BAPPEDA Papua Barat.</p>			

Pelantikan Gubernur Papua Barat tersebut menandai berlakunya kewenangan daerah untuk menjalankan mandat/otoritas antara lain untuk, memberikan perhatian lebih banyak terhadap ancaman lingkungan di masing-masing wilayah. Karenanya, program pembangunan kapasitas bagi pemerintah daerah (melalui pelatihan atau pendampingan) sangat mendesak dilakukan guna mendukung Pemda melaksanakan model atau pola terbaik untuk melindungi lingkungan dari dampak kerusakan terutama yang disebabkan oleh investasi asing berskala besar.

Pembangunan infrastruktur di Papua Barat, hendaknya melihat kepentingan atas kebutuhan masyarakat, ketimbang memilih tujuan, efisiensi dan efektivitas hasil jangka pendek, misalnya pembangunan jalan, yang lebih berfungsi menjadi akses jalan tol bagi operasi BP Tangguh LNG, tetapi sekaligus dapat memicu pertumbuhan penduduk lebih cepat. Hal ini akan berdampak pada lingkungan sekitar, karenanya diperlukan konsultasi publik sebelum mengaplikasi suatu kebijakan/pelaksanaan suatu program.

Konsep SP3 (DGS) telah ditawarkan untuk menghindari terjadinya pemusatan kegiatan pembangunan di wilayah operasi BP Tangguh LNG di Teluk Bintuni. Kegiatan pembangunan dalam konsep SP3 ini diusahakan tersebar secara merata di kabupaten lainnya di sekitar Teluk Bintuni (misalnya: Fakfak, Sorong Selatan, dan Manokwari). Revitalisasi Tim SP3 diperlukan dalam hal ini melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan yang tepat untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah masing-masing.

Tim Proyek pada awalnya terfokus dalam pelaksanaan kegiatan proyek berdasarkan masing-masing ekpektasi hasil yang diharapkan. Hal ini menyebabkan para anggota Tim Proyek kurang menyatu dalam kegiatan utama proyek. Menjelang akhir 2005 kegiatan Tim Proyek lebih terintegrasi pelaksanaannya berdasarkan kelanjutan dari pencapaian nyata proyek, yakni: dokumen arahan perencanaan tata ruang wilayah (*Regional Development Plan*), dan konsep-konsep pengelolaan kawasan bersama (*Joint Management Area*), dan penyebaran pembangunan yang merata (*Diversified Growth Strategy*).

Kebijakan penempatan Tim Proyek pada satu lokasi sejak 1 Juli 2006 ditempuh berdasarkan kebutuhan utama proyek untuk dapat lebih berkonsentrasi secara penuh dalam mensosialisasikan dokumen/proyek konsep ke para pemangku kepentingan terkait di Papua Barat. Hal ini terbukti memberikan hasil yang sangat positif dengan terselesaikannya dokumen RPJMD dalam kurun waktu 72 hari sejak pelantikan Gubernur Papua Barat, dan kemudian pengesahan SK Gubernur untuk pelaksanaan RPJMD terkait.

Masalah pemindahan kegiatan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat, yang selama ini masih belum terlaksana, telah diputuskan dalam Pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 8 Desember 2006, bahwa kegiatan proyek berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Provinsi Papua, dapat diakhiri di bulan Maret 2007. Selanjutnya, Tim Proyek menyusun inisiatif proyek baru berdasarkan MOU baru dengan Provinsi Papua Barat untuk melanjutkan kegiatan proyek yang nantinya terintegrasi dalam kegiatan dari Pemda Papua Barat, donor lainnya, atau/dan proyek UNDP lainnya seperti People-centred Development Programme.

Kegiatan yang telah dirintis dan dihasilkan oleh proyek *Capacity 2015 in Papua & Papua Barat* dapat dijadikan sebagai dasar bagi pembuatan dokumen inisiatif baru, sehingga akan didapatkan benang merah yang sama bagi kepentingan keberlanjutan ide, filosofi serta perencanaan yang telah terbina dengan baik bersama Pemda Papua Barat selama ini bagi kegiatan proyek ke depannya.

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 1-7-003

Kontribusi dari UNDP-PDP

<p>Judul Proyek:</p> <p>People-centered Development Programme - Program Pembangunan yang Mengutamakan Rakyat (Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan Manusia/Tujuan Pembangunan Millenium)</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advisory Board Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. - BAPPEDA Papua dan Papua Barat
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):</p> <p>± 23,870,202 USD (2006-2010), UNDP dan beberapa negara donor</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>BAPPENAS bermitra dengan UNDP (dan lembaga PBB lainnya)</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Program ini mendukung untuk pembangunan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang diformulasikan berdasarkan pada kajian kebutuhan yang dilakukan para berbagai pemangku kepentingan yang berfokus terhadap pemerintah lokal dan prioritas masyarakat dalam bidang makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan dan peri kehidupan masyarakat. Program menyediakan suatu kerangka, di mana para pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam memperkuat kapasitas lokal yang bersifat strategis dan penting dalam pembangunan manusia yaitu berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin, pendataan dan perencanaan operasional; 2) Peragaan pendekatan tepat guna dalam pembangunan manusia dan pelayanan kebutuhan dasar dan penyediaan pendampingan yang efektif; 3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan manusia; serta 4) Koordinasi program pembangunan manusia dan harmonisasi dukungan donor. <p>Program ini meliputi serangkaian aktifitas yang berada dalam ruang lingkup empat komponen di atas yang mendukung tujuan pembangunan kapasitas bagi lembaga-lembaga pelaksana setempat berkaitan dengan MDGs. Program ini memiliki nilai tambah terhadap inisiatif yang direncanakan maupun yang ada, dengan memperbaiki koordinasi, menciptakan kesempatan bagi pembelajaran lintas pihak, kemitraan dan pembentukan kepercayaan. Program ini dimaksudkan sebagai suatu program dukungan lima tahun, dan melalui program ini pula akan dibangun program bantuan lanjutan yang lebih efektif dan berkesinambungan di Papua dan Papua Barat.</p>	

<p>Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1-1 Asupan makanan dan gizi <input checked="" type="checkbox"/> 1-2 Kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> 1-3 Pendidikan <input checked="" type="checkbox"/> 1-4 Ekonomi Lokal <input checked="" type="checkbox"/> 1-5 Kesetaraan Gender <input checked="" type="checkbox"/> 1-6 Infrastruktur Dasar <input checked="" type="checkbox"/> 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa <input type="checkbox"/> 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan <input type="checkbox"/> 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia <input type="checkbox"/> 4-0 Lain-lain <p>Program berfokus pada pembangunan kapasitas para pihak baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil, serta berfokus pula pada MDG seperti kesehatan, pendidikan, peri kehidupan, jender dan lingkungan hidup.</p>	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Provinsi: <input checked="" type="checkbox"/> Kabupaten: <input type="checkbox"/> Kota: <input checked="" type="checkbox"/> Distrik(Kecamatan): <input checked="" type="checkbox"/> Kampung/Desa: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Provinsi</td> <td style="width: 35%;">Papua</td> <td style="width: 35%;">Papua Barat</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten</td> <td>-Yapen Waropen, -Mimika, -Boven Digoel, -Jayawijaya, -Yahukimo, -Sarmi (6 Kab.)</td> <td>-Fak-Fak, -Raja Ampat (2 Kab.)</td> </tr> <tr> <td>Kota</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distrik (Kecamatan)</td> <td>12</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Kampung / Desa</td> <td>± 120</td> <td>± 20</td> </tr> </table> <p>Dua distrik di delapan Kabupaten sudah diseleksi oleh Advisory Board di Kabupaten Sarmi, Yapen, Jayawijaya, Yahukimo, Boven Digoel, Mimika, Fak-fak, Raja Ampat</p>	Provinsi	Papua	Papua Barat	Kabupaten	-Yapen Waropen, -Mimika, -Boven Digoel, -Jayawijaya, -Yahukimo, -Sarmi (6 Kab.)	-Fak-Fak, -Raja Ampat (2 Kab.)	Kota			Distrik (Kecamatan)	12	4	Kampung / Desa	± 120	± 20
Provinsi	Papua	Papua Barat														
Kabupaten	-Yapen Waropen, -Mimika, -Boven Digoel, -Jayawijaya, -Yahukimo, -Sarmi (6 Kab.)	-Fak-Fak, -Raja Ampat (2 Kab.)														
Kota																
Distrik (Kecamatan)	12	4														
Kampung / Desa	± 120	± 20														
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>Seorang penasihat bagi setiap komponen akan membantu lembaga kunci dari pemerintah dan masyarakat sipil, dalam memprogramkan aktifitas / intervensi untuk mencapai tujuan program; BAPPEDA mengkoordinasikan proses pemrograman tersebut dan memantau perkembangan pelaksanaan; BPMD membina dan mengelola komponen pendampingan pada tingkat Distrik dan Kampung; Rencana kerja tahunan disiapkan oleh mitra-mitra pelaksana untuk disetujui oleh Advisory Board Provinsi Papua and Papua Barat; Advisory Board aktif berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dari pencapaian program; UNDP berperan sebagai manajer keuangan dari trust fund, dan melakukan pembayaran langsung kepada vendors; Pemerintah Provinsi serta Kabupaten mengalokasikan dana untuk pelayanan kebutuhan dasar; program diharapkan berkembang luas (setelah satu atau dua tahun) ketika provinsi dan kabupaten menyediakan lebih banyak dana yang lebih tersedia dan atau ketika donor menyediakan pendanaan tambahan.</p>																

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Program ini dimulai tanggal 1 July 2006; dengan periode pendahuluan sampai akhir tahun 2006. Dalam fase pendahuluan struktur dan prosedur pelaksana disiapkan, disediakan pelatihan dan pendampingan kepada BAPPEDA Provinsi dalam mempersiapkan RPJP (berdasarkan hasil Sintesis dari Papua Needs Assessment) dan RPJM (berdasarkan visi dan misi dari Gubernur terpilih), serta menyediakan pendampingan bagi Bappeda Kabupaten (Boven Digoel, Mimika, Jayawijaya, Yahukimo, Sarmi, Yapen Waropen, Raja Ampat dan Fak-Fak) dalam mempersiapkan RPJM Renstra sektoral serta dalam membangun penguatan Distrik/strategi desentralisasi fiskal.

Hikmah pengalaman yang dipetik dari *Papua Needs Assessment* diantaranya yakni adanya berbagai kebutuhan untuk dukungan pendampingan jangka lebih panjang yang lebih berkesinambungan, membangun berdasarkan pendekatan-pendekatan sukses sebelumnya, menerapkan pendekatan yang mengurangi ketergantungan dan membangun kapasitas yang berkesinambungan, membangun kemitraan antara pemerintah lokal dan organisasi masyarakat sipil, terutama lembaga agama yang memiliki jaringan luas serta kapasitas untuk mendukung komunitas.

NB: informasi selanjutnya dapat diperoleh dari website: www.undp.or.id/papua

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 1-7-004

Kontribusi dari UNDP-PePP

Judul Proyek: Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP)	Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): Bappenas Directorate of Poverty Alleviation Jl.Taman Suropati No.2 Jakarta 10310 Telp.021-3915227
Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): +/- 1 juta dollar Amerika, yang sepenuhnya merupakan hibah dari UNDP	Mitra penanggung jawab: Pemda dan Bappeda
Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas): Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) dirancang untuk mengangkat sumberdaya yang tersedia dan pengetahuan untuk membantu dan memberdayakan masyarakat miskin untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) sebagai akses mereka terhadap layanan sosial dan aktifitas ekonomi yang mendasar, sehingga turut berkontribusi terhadap pencapaian Millenium Development Goals. Pe-PP diucapkan seperti "pep" yang artinya "energy dan semangat yang kuat", dan menggambarkan bahwa masyarakat menjadi berdaya dengan akses terhadap informasi, serta aktif mengkomunikasikan kebutuhan dan perhatian mereka, serta membantu diri mereka sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka. Project ini memiliki tujuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Untuk memberdayakan dan memobilisasi masyarakat miskin untuk aktifitas ekonomi dan mengakses layanan sosial melalui penyediaan akses yang baik terhadap informasi dan komunikasi- Untuk membentuk kemitraan strategis dengan bersama-sama membawa upaya individu demi keuntungan masyarakat miskin.- Untuk membangun pusat pemberdayaan masyarakat multifungsi berbasis telecenter, yang menyediakan akses bersama terhadap komunikasi dan informasi bagi masyarakat miskin dan menjadi sarana dimana para mitra dapat membawa berbagai layanan dan peluang.- Untuk menyebarkan berbagai praktek terbaik dan pembelajaran dari proyek percontohan dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai aplikasi dan potensi TIK untuk mengurangi kemiskinan, sehingga berkontribusi terhadap formulasi kebijakan nasional dan regional dan replikasi dari sukses pelaksanaan TIK untuk aktifitas pengurangan kemiskinan.	

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)

- 1-1 Asupan makanan dan gizi
- 1-2 Kesehatan
- 1-3 Pendidikan
- 1-4 Ekonomi Lokal
- 1-5 Kesetaraan Gender
- 1-6 Infrastruktur Dasar
- 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa
- 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4-0 Lain-lain

(telecenter serbaguna untuk pengembangan masyarakat – melayani bidang pembangunan lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi)

Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)

- Provinsi:
- Kabupaten:
- Kota:
- Distrik(Kecamatan):
- Kampung/Desa:

Provinsi	Papua	Papua Barat
Kabupaten		Fakfak
Kota		-
Distrik (Kecamatan)		Teluk Patipi
Kampung / Desa		Sekban / Tetar

Pola Pelaksanaan:

Model telecenter Pe-PP mengintegrasikan akses terhadap TIK dengan aktifitas pemberdayaan masyarakat. Model ini dilakukan melalui pendampingan intensif kepada kelompok masyarakat secara partisipatoris. Fasilitator Infomobilisasi (pendamping lapangan) direkrut untuk memberdayakan masyarakat miskin untuk memanfaatkan TIK sebagai akses mereka terhadap layanan sosial dan kegiatan ekonomi yang mendasar. Telecenter sebaiknya menyediakan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, yang secara jelas menghubungkan kegiatan sehari-hari masyarakat dengan penerapan TIK. Hal ini khususnya penting untuk keberlanjutan dari pelaksanaan telecenter di wilayah pedalaman yang miskin. Oleh karenanya, pendekatan terintegrasi antara akses dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendirian telecenter di Kabupaten Fakfak dirancang untuk menjadi bagian yang terintegrasi dengan *People-centered Development Programme*. Untuk itu, komunikasi intensif dengan tim dari *People-centered Development Programme* menjadi sangat penting untuk membangun sinergi yang lebih jauh demi kesuksesan program yang diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Millenium Development Goals.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Proyek percontohan telecenter di Papua dan Papua Barat baru saja didirikan pada bulan Desember 2006. Satu telecenter terletak di desa Sekban, Distrik Fakfak Kota dan satu lainnya terletak di desa Tetar, Distrik Patipi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: kesiapan infrastruktur mendasar seperti listrik dan telepon; jumlah populasi, komiditas lokal yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pala, dan juga kesiapan dari tuan rumah telecenter itu sendiri.

Tim pengelola telecenter direkrut secara purna waktu. Di desa Sekban, tim ini terdiri dari 1 orang fasilitator infomobilisasi dan 1 orang IT administrator. Pengelola telecenter Sekban akan direkrut segera. Di desa Teluk Patipi, Distrik Tetar, proyek telah memfasilitasi 1 orang fasilitator infomobilisasi secara purna waktu. Pemerintah lokal telah berkomitmen untuk merekrut dan memperkuat tim ini demi kesuksesan pelaksanaan telecenter.

Karena telecenter di Fakfak baru beroperasi secara efektif selama 1 bulan, belum banyak pembelajaran yang dapat diperoleh. Namun demikian, yang sangat penting adalah komitmen dari pemerintah lokal khususnya dan pihak terkait lain (stakeholder) untuk secara serius melanjutkan inisiatif ini demi kesejahteraan masyarakat miskin di Papua dan Papua Barat.

**Pelatihan Keterampilan / Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 3-0-001

Kontribusi dari **SIL**

<p>Judul Proyek: Proyek Pelatihan Keterampilan – Pusat Pelatihan</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL International P.O. Box 1 Sentani 99352, Jayapura - Papua Phone: (0967) 593 971 Fax : (0967) 593 974 Email: mike_eastwood@sil.org Director – Mike Eastwood</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp. 2 milyar (hasil penjualan kantor SIL di Abepura) - Peralatan kantor (komputer, printer, kamera) dari BPMD 	<p>Mitra Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua dan Papua Barat Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Papua dan Papua Barat Yayasan: Yayasan Jasa Aviasi Indonesia (YAJASI); Yayasan Betania Indonesia (YBI); Yayasan Pelayanan Antarbudaya; Yayasan Karunia Bhakti Budaya (Kartidaya); Yayasan Penginjilan dan Persekutuan Masieray (YPPM).</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan LSM lokal, SIL membantu memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis bahasa lokal melalui beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah survey, keaksaraan, pengembangan masyarakat, kesehatan, komputer, pelayanan media yang sesuai, dan penerjemahan bahasa daerah.</p> <p>Hasil survey bahasa menunjukkan bahwa terdapat 271 dialek bahasa di Provinsi Papua dan Papua Barat, 269 bahasa yang hidup dalam arti digunakan oleh penuturnya, satu bahasa di ambang kepunahan dan satu bahasa yang telah punah.</p> <p>Sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlengkapi Putra Daerah untuk mengembangkan komunitas terpencil di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan keahlian pada bidang-bidang teknis tersebut di atas yang dianggap sangat penting dalam komunikasi lintas budaya antara komunitas mereka dengan dunia luar. Pelatihan keterampilan merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat daerah untuk menguasai keterampilan-keterampilan baru. Pusat Pelatihan SIL bertujuan untuk menyediakan pusat pengembangan kapasitas masyarakat bagi penduduk lokal. Kursus yang ada di Pusat Pelatihan SIL antara lain pelatihan komputer (diagnostik dan perbaikan perangkat keras, penggunaan program MS Windows, analisa data bahasa), pelatihan bahasa dan lainnya.</p>	

Di Pusat Pelatihan SIL juga dikembangkan Pelayanan Media yang Sesuai sebagai cara untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Media yang Sesuai (non cetak) sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak dapat membaca, karena banyak masyarakat di Papua dan Papua Barat merupakan masyarakat tutur. SIL juga melatih fasilitator untuk menggunakan dan mengembangkan Pelayanan Media yang Sesuai untuk mengajarkan teknik pengembangan masyarakat.

Ruang lingkup focus/sector yang didukung:

- 1-1 Asupan makanan dan gizi
- 1-2 Kesehatan
- 1-3 Pendidikan
- 1-4 Ekonomi Lokal
- 1-5 Kesetaraan Gender
- 1-6 Infrastruktur Dasar
- 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa
- 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4-0 Lain-lain

Pelatihan Keterampilan
Pelayanan Media yang Sesuai

Lokasi/ruang lingkup wilayah:

- Provinsi
- Kabupaten
- Kota
- Distrik/Kecamatan
- Kampung

Provinsi	Papua	Papua Barat
Kabupaten	1. Jayapura 2. Sarmi 3. Pegunungan Bintang 4. Yahukimo 5. Jayawijaya 6. Boven Digoel 7. Mappi 8. Nabire	1. Sorong Selatan 2. Manokwari
Kota		
Distrik (Kecamatan)		
Kampung / Desa		

Di beberapa kelompok bahasa dan kabupaten tempat kerja SIL:
Jayapura, Sarmi, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Jayawijaya, Boven Digoel, Mappi, Sorong Selatan, Nabire, Manokwari

Pola Pelaksanaan:

Diharapkan pelatihan/pendidikan informal yang disediakan akan dikembangkan dan diterapkan di masa mendatang sebagai berikut:

- Pelatihan dalam bidang teknik-teknik survei, menganalisa bahasa, komunikasi lintas budaya dan prinsip-prinsip dasar penerjemahan.
- Kursus Bahasa Inggris.
- Pelatihan komputer.
- Pelatihan dalam bidang kesehatan masyarakat.
- Pelatihan dalam bidang literasi (pemberantasan tuna aksara)
- Pelatihan dalam bidang pengembangan masyarakat.
- Pelatihan dalam bidang media non-cetak (Appropriate Media Services)

Bahasa Indonesia atau Malaysia-Papua yang sederhana selalu digunakan dalam setiap kursus sehingga transfer teknologi menjadi lebih mudah dimengerti dan mengundang peserta untuk berpartisipasi dan pro-aktif dalam tiap kursus yang diberikan.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Proyek pengembangan masyarakat dengan pendekatan melalui bahasa dan budaya besar kemungkinannya untuk berhasil dan terus berlanjut dengan dukungan dari masyarakat lokal melalui keterlibatan mereka dan keinginan mereka untuk meningkatkan diri mereka sendiri.

Pelatihan keterampilan sangat mendukung pekerjaan para peserta kursus. Kursus dirancang sedemikian rupa sehingga para peserta yang datang dari berbagai daerah di Papua dan Papua Barat dengan latar belakang, tingkat pendidikan yang berbeda dapat mengikuti kursus pada saat yang bersamaan.

Media visual juga efektif untuk penyebaran informasi. VCD tentang HIV/AIDS dalam bahasa Kemuik dan Una sangat diterima oleh orang dewasa yang tidak dapat membaca. Bagi mereka yang sedang belajar membaca, mereka dapat mengikuti ceritanya dalam buku pelajaran kesehatan mereka. Sekarang SIL memiliki VCD tentang HIV/AIDS, Flu Burung. VCD tentang flu burung sedang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal.



Gambar 2. Peserta kursus komputer



Gambar 3. Lulusan kursus komputer



Gambar 4. Training Center



Gambar 5. Training Center